

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis pada bab bab sebelumnya, baik teori dan data yang diperoleh. Peneliti menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan klas II B Kabupaten Sleman sudah efektif, berjalan maksimal sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta sesuai dengan sepuluh (10) prinsip pemasarakatan, yang salah satunya mensyaratkan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan, tidak boleh hanya untuk mengisi waktu luang saja serta memiliki manfaat bagi warga binaan setelah bebas nanti. Seperti keterampilan sablon, keterampilan pertukangan kayu, keterampilan cukur rambut, keterampilan pertanian, dan keterampilan service elektronik.
2. Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan klas II B Kabupaten Sleman yang sudah dilakukan masih memiliki kendala.

kendala- kendala yang ditemui dalam pembinaan latihan kerja keterampilan di Lembaga Pemasarakatan klas II B Kabupaten Sleman antara lain :

- a. Kendala pada jumlah petugas Lembaga Pemasarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan.
- b. Kendala pada tempat untuk melakukan pembinaan latihan kerja (Keterampilan).
- c. Kendala dibidang permodalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran, antara lain :

1. Perlu penambahan jumlah petugas Lembaga Pemasarakatan yang merupakan tenaga ahli dibidang pemberian pelatihan kerja, agar dapat memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasarakatan secara optimal, sehingga pembinaan latihan kerja tidak hanya berpatokan pada petugas saja, melainkan sudah ditangani oleh tenaga ahli dibidangnya dan petugas yang biasanya memiliki tugas untuk membina warga binaan pemasarakatan juga menjadi terbantu untuk melaksanakan tugasnya, agar fokus pembinaanya dapat terlaksana dan lebih

mudah mengawasi warga binaan yang sedang mengikuti pembinaan pembekalan latihan kerja keterampilan.

2. Perlu perluasan bangunan Lembaga Pemasyarakatan guna memenuhi atau mencukupi sarana dan prasarana penunjang dari proses pembinaan latihan kerja keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Sleman, dengan penambahan ruangan diharapkan warga binaan yang mengikuti program pembinaan bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas, tanpa harus tergabung dengan ruangan pembinaan latihan kerja yang lainnya, sehingga diharapkan pembinaan latihan kerja dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi untuk kedepannya.
3. Perlunya perhatian dari pemerintah untuk memberikan anggaran kepada Lembaga Pemasyarakatan, mengingat Lembaga Pemasyarakatan memberikan andil yang cukup besar dalam membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik serta tidak mengulangi perbuatan jahatnya, dengan modal yang cukup diharapkan Lembaga Pemasyarakatan mampu memberikan pembinaan yang lebih baik kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai bekal mereka untuk kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Widiado Gunakarya SA, *"Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan."* Penerbit Armico, Bandung 1988.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muladi, *pembinaan narapidana dalam kerangka rancangan Undang Undang Hukum Pidana Indonesia*, FH UI, 1988.
- Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H. dan Pandapotan Simorangkir, S.H., *LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV INDHILL CO, Jakarta, 2007.
- R. Achmad S. Soema & Romli Atmasasmita, *"Sistem Pemsyarakatan Indonesia"*. Penerbit Bina Cipta, Bandung 1986.
- Suharso. Drs, dan Ana Retnoningsih, Dra. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux (Semarang: CV widya karya, 2009)
- Soedjono Dirdjosisworo, *"Sejarah dan Asas-asas Penologi"*. penerbit Armico Bandung 1984 .

B. Peraturan perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1995
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Lembaran Negara Nomor 165 tahun 1999
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaran Negara nomor 63 tahun 1999
- Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan

C. Website

<http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000063541.html>

<http://122.200.145.230/index.php?mib=news.detail&id=70699>

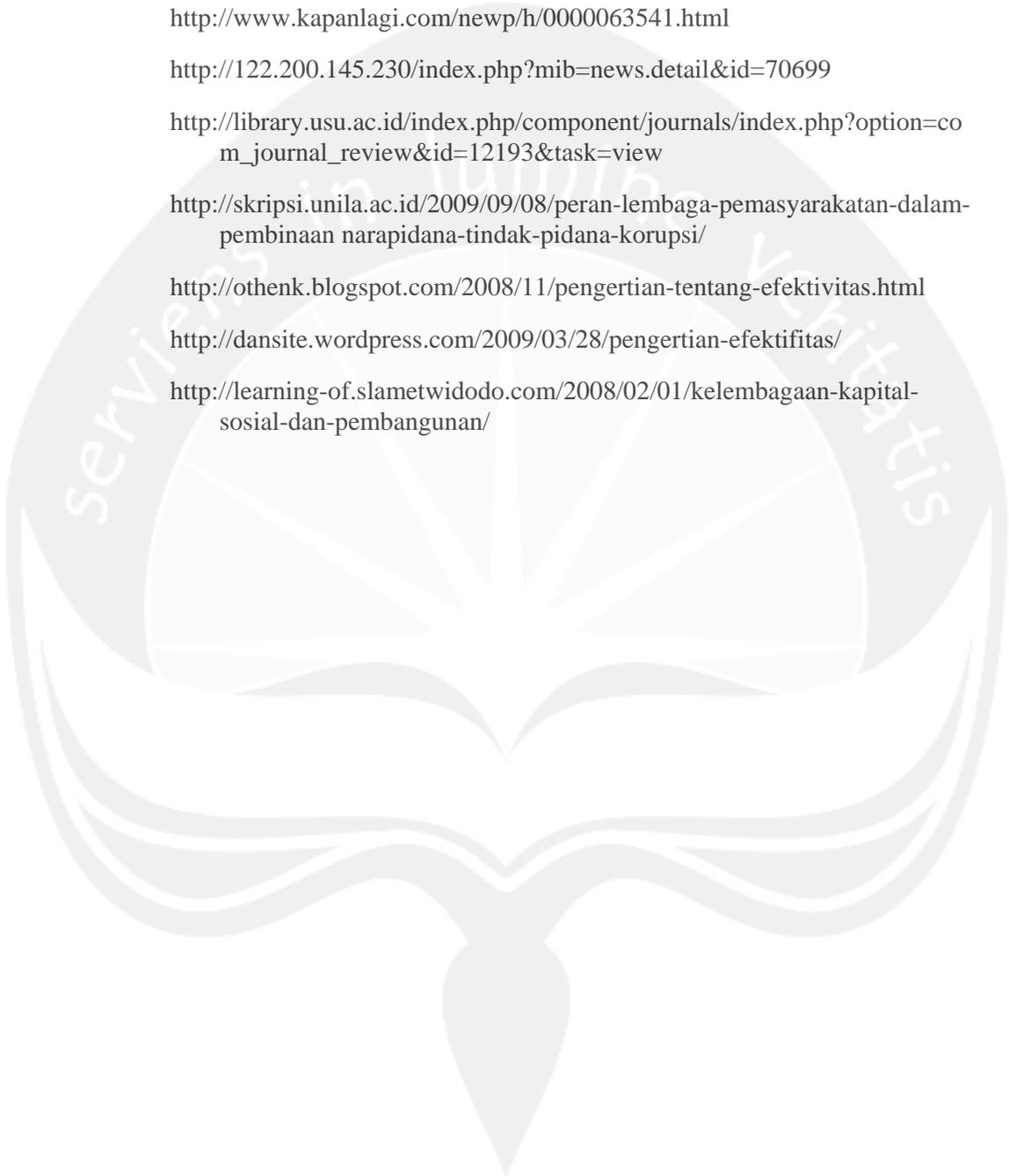
http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal_review&id=12193&task=view

<http://skripsi.unila.ac.id/2009/09/08/peran-lembaga-pemasyarakatan-dalam-pembinaan-narapidana-tindak-pidana-korupsi/>

<http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html>

<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>

<http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/kelembagaan-kapital-sosial-dan-pembangunan/>









SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.PAS.d-LT.01.04- 999

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. B. SUKAMTO HARTO, Bc.IP
NIP : 19570520 198103 1 001
Pangkat / Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : I WAYAN WAHYU WIRA UDYTAMA
NPM : 06.05.09475
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah selesai mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman guna menyusun skripsi dengan judul : " EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PEMBEKALAN KETERAMPILAN PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN"

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 30 Maret 2010

Kepala,



[Signature]
Drs. B. SUKAMTO HARTO, Bc.IP
NIP. 19570520 198103 1 001

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY di – Yogyakarta
2. Prodi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di- Yogyakarta